



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VICTOR SELAMAT ZAGOTO
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 19158

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m²/140 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m²/48 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 2438 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 35 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah Seluas 2125 m² di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 165.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 91.355.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 211.300.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.867.655.000

III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.667.655.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.